



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI**

Tahun Sidang	:	2017-2018
Masa Persidangan	:	V
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN atau Menteri berdasarkan surat Presiden RI No. R-44/Pres/ 09/2017 Tgl. 6 September 2017 tentang Penunjukan Sementara Menteri Perindustrian RI untuk menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI dalam rangka pembahasan terkait dengan BUMN.
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	11 (sebelas)
Hari/Tanggal	:	Selasa, 5 Juni 2018
W a k t u	:	Pukul 14.00 s.d 15.55 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	H. Dito Ganinduto, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/FPG), didampingi oleh: 1. Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ FPD); 2. H. Inas Nasrullah Zubir, B.E., S.E. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F.Hanura).
Sekretaris Rapat	:	Eguh Setiawan, S.IP. (Plt. Kabag Set. Komisi VI DPR RI)
A c a r a	:	Membahas Kinerja Kementerian BUMN
Hadir	:	1. 27 dari 51 Anggota Komisi VI DPR RI. 2. Menteri BUMN atau Menteri berdasarkan Surat Presiden RI No. R-44/Pres/09/2017, beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN atau Menteri berdasarkan surat Presiden RI No. R-44/Pres/09/2017 dibuka pukul 14.00 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda Rapat Kerja pada hari ini adalah dalam rangka membahas Kinerja Kementerian BUMN.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Menteri BUMN atau Menteri berdasarkan surat Presiden RI No. R-44/Pres/09/2017 untuk menjelaskan Kinerja Kementerian BUMN.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan atas penjelasan Menteri BUMN RI atau Menteri berdasarkan surat Presiden RI No. R-44/Pres/ 09/2017.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI meminta agar Kementerian BUMN untuk terus melakukan peningkatan kinerja agar tercapainya target indikator kinerja utama (IKU) dalam Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2015-2019, terutama untuk jumlah pendapatan 3 (tiga) BUMN terbesar, yaitu PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Inalum (Persero), serta penyelenggaraan RUPS tepat waktu.
2. Komisi VI DPR RI mengapresiasi atas peningkatan kinerja keuangan BUMN dari Tahun 2014 sampai dengan 2017 dengan peningkatan jumlah aset menjadi sebesar Rp7.212 triliun atau naik 57% dan laba tahun berjalan menjadi sebesar Rp186 triliun atau naik 26% dengan kontribusi terhadap APBN sebesar Rp351 triliun, yang terdiri dari pajak sebesar Rp211 triliun, PNBPN sebesar Rp99 triliun dan dividen sebesar Rp41 triliun.
3. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk melakukan audit/pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
4. Komisi VI DPR RI akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero).
5. Komisi VI DPR RI akan melakukan RDP dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Pertamina (Persero) untuk membahas mengenai bahan bakar jet (avtur).
6. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan permintaan data dari Komisi VI DPR RI.

Catatan:

- (1) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk menyampaikan data secara rinci mengenai progress realisasi Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2015 dan 2016 untuk dibahas dalam Panitia Kerja PMN Komisi VI DPR RI.
- (2) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk menyampaikan data hutang, penjaminan dan agunan, serta skema pengembaliannya dari masing-masing BUMN.
- (3) Kesimpulan nomor 3 atas usul Fraksi PDI Perjuangan Komisi VI DPR RI, Fraksi PAN DPR RI belum dapat menyetujui sebelum dilakukan RDP dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.55 WIB.